

BUDI DAYA

Petani lada tunda pemupukan

PANGKAPLINANG: Petani lada di Desa Bakam, Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung kesulitan mendapatkan pupuk karena koperasi dan toko penjual komoditas itu masih tutup.

Zulkarnain, petani lada di desa setempat, mengatakan koperasi dan toko pupuk masih tutup, sehingga pemupukan lada terpaksa ditunda hingga koperasi dan toko buka.

"Kami terpaksa menunda pemupukan tanaman lada yang seharusnya dipupuk 2 minggu lalu yang disebabkan menjelang dan setelah Lebaran, koperasi dan toko tutup," ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan untuk mengantisipasi sulitnya mendapatkan pupuk, para petani sebelum memasuki bulan puasa sudah mulai membeli sebagai stok dan pemupukan setelah Lebaran. Namun, karena persediaan pupuk di koperasi dan toko terbatas, sehingga tidak bisa menyetok dan memupuk tanaman lada. (ANTARA)

TPI tidak dimanfaatkan

MUKOMUKO, Bengkulu: Warga Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu menilai keberadaan bangunan tempat pelelangan Ikan (TPI) di daerah itu terkesan mubazir karena tidak difungsikan.

Hamdani, warga Ipuh, mengatakan meski sudah dibangun sejak 4 tahun lalu namun ironisnya sampai sekarang TPI di daerah itu dibiarkan tak bermanfaat.

"Sayang jika TPI tidak digunakan karena untuk pembangunan saja uang yang dikeluarkan mencapai ratusan juta," untkapnya, Selasa.

Kepala Desa Pulau Makmur, Kec. Ipuh, Abdul Mutalib, membenarkan bahwa bangunan TPI belum dimanfaatkan nelayan daerah itu.

Namun Camat Ipuh Kanadi mengatakan nelayan sudah memanfaatkan TPI dan tempat penambatan perahu. (ANTARA)



CEGAH HAMA ULAT:

Petani menyemprotkan cairan pembasmi hama ulat ke tanaman padi di Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Tengah, kemarin. Untuk mengantisipasi penyebaran hama ulat, penyemprotan itu dilakukan beberapa kali hingga menjelang panen.

Pertanian bergulat dengan kisah klasik

Program revitalisasi jalan di tempat

OLEH MARTIN SIHOMBING
Wartawan Bisnis Indonesia

Melihat perkembangan pembangunan pertanian, paling tidak dalam 10 tahun terakhir, kita layak mengelus dada.

Negeri yang dianggap sebagai negara agraris, ternyata tidak mampu berbuat banyak. Bahkan, kesan yang muncul, pemerintah pun rada bersikap masa bodoh. Betapa tidak. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tercatat sebagai importir jagung nomor 22 di dunia atau rata-rata mengimpor sebesar 962.240 ton. Sementara untuk impor gula, Indonesia menempati urutan kedua.

"Lalu Indonesia juga mengimpor 1,18 juta ton kedelai atau importir ranking 11 dunia, serta impor 822.700 ton gula atau importir ranking dua dunia," papar anggota Komisi IV DPR Siswono Yudhohusodo dalam seminar bertema *Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kemandirian Bangsa* di Jakarta Media Center, belum lama ini.

Sementara itu, impor jenis buah-buahan mandarin, durian, mangga, nanas, apel, anggur, pir, dan lainnya juga terus meningkat. Nilainya pada 2004 mencapai US\$213,1 juta dan US\$318,2 juta pada 2006. Antara 2007-2008, Indonesia mengimpor gula 37,48% dari kebutuhan nasional.

Tahun ini, diperkirakan 400.000 gula kristal putih akan diimpor. Bahkan jagung, lebih dari 1 juta ton. Untuk impor garam rata-rata 1,5 juta ton per tahun atau sekira Rp900 miliar atau 50% dari kebutuhan garam nasional. Impor kedelai 70% dari kebutuhan nasional, jagung 11,23% dari kebutuhan nasional, dan kacang tanah 15% dari kebutuhan nasional.

Maka tak bisa dielakkan, ketika potensi alam tidak mampu dimaksimalkan untuk dijadikan salah satu pilar ekonomi bangsa, orang akan mengatakan lagi-lagi pemerintah gagal membangun pertanian.

Pertanian Indonesia di persimpangan jalan

Kontribusi pertanian dalam pembangunan ekonomi

1. Penyerap tenaga kerja
2. Kontribusi terhadap pendapatan
3. Kontribusi dalam penyediaan pangan
4. Pertanian sebagai penyedia bahan baku
5. Kontribusi dalam bentuk modal
6. Pertanian sebagai sumber devisa.

Sumber: Anton Apriyanto, mantan Menteri Pertanian

- Impor tinggi
- Petani terpinggirkan
- Organisasi tani kurang berfungsi
- Infrastruktur pertanian terabaikan
- Investasi rendah
- Akses pasar lemah
- Akses lembaga keuangan lemah

Persoalan pertanian saat ini

BISNIS/PURNAMA

Sinar Mas deklarasikan soal karbon

OLEH ERWIN TAMBUNAN
Bisnis Indonesia

BEIJING: Sinar Mas Forestry (SMF), melalui anak usahanya PT Putra Riau Perkasa (PRP), mendeklarasikan konsesi hutan produksinya di Semenanjung Kampar seluas 15.640 hektare (ha) sebagai wahana penyimpanan karbon dengan melakukan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan lestari.

Deklarasi proyek pengembangan penyimpanan karbon itu ditandai penandatanganan deklarasi yang dilakukan Direktur PRP Sandrawati Wibowo dengan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto di Kedutaan Besar RI di Beijing, kemarin.

Hadir dalam penandatanganan deklarasi itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Duta Besar RI untuk China Imron Cotan, Managing Director Sinas Mas Gandi Sulistyanto Suherman dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Gandi mengatakan penandatanganan dekla-

rasi itu merupakan bagian dari 397.000 ha hutan yang dijadikan perusahaan sebagai hutan konservasi.

"Selama ini, perusahaan memperoleh konsesi seluas 2,4 juta, 1 juta ha telah dilakukan penanaman, sedangkan kawasan hutan konservasi yang dikelola Sinar Mas seluas 397 ha."

Menurut dia, deklarasi itu sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dunia sebesar 26%.

"Sinar Mas mendukung sepenuhnya program pemerintah yang telah menandatangani LoI [letter of intent] dengan Pemerintah Norwegia," katanya.

Menhut Zulkifli Hasan mengatakan upaya yang dilakukan Sinar Mas Forestry untuk mendeklarasikan sebagian konsesi hutan produksinya sebagai penyimpanan karbon patut dihargai.

"Tidak benar jika selama ini banyak kalangan lembaga swadaya masyarakat asing yang mengklaim bahwa perusahaan HTI sebagai perusak lingkungan."

Dan, ketika pemerintah berkeletik bahwa semua itu akibat kondisi yang tidak bisa dicegah manusia seperti bencana alam, El Nino atau La Nina, kita sudah lupa bahwa pemerintah pernah berbuat sesuatu.

Lantaran alasan itu, selalu diangkat dari tahun ke tahun talkala target pembangunan pertanian gagal dicapai. Padahal, triliunan rupiah uang rakyat sudah digelontorkan untuk membangun pertanian sekaligus menciptakan lapangan dan kesejahteraan petani itu sendiri. Tentu selain menjaga ketahanan pangan bangsa.

Lihat saja, misalnya, program revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Subang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Atau revitalisasi pabrik gula sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ujungnya, pemerintah hanya mampu menghasilkan swasembada beras. Soal infrastruktur pertanian, kesejahteraan petani, urusan lahan abadi untuk pertanian saja, kita tidak mampu menuntaskannya. Apalagi soal kesejahteraan petani, yang jumlahnya relatif besar yakni 25 juta KK tani.

Bahkan hingga kini, soal pendidikan formal petani yang rendah dan sudah disadari sejak lama, tetap saja rendah.

Namun, justru biaya pembangunan pertanian tiap tahun naik. Belum lagi jika kondisi petani yang sejak lama sudah diakui buruk—seperti rendahnya regenerasi petani, miskin, produktivitas rendah—tetap saja tak berubah.

Bahkan, penguasaan lahan yang kecil hingga tidak mendukung kesejahteraan petani, terkesan seperti dipelihara. Sehingga setiap tahun, pemerintah bisa mencari bahan untuk meminta pengertian. "Yah, lahan

petani hanya 0,2 ha. Sulit dipacu."

Ditambah lagi, saat dalam posisi 'ditekan' sering kita dengar pemerintah mengatakan, "Petani lemah dalam memperjuangkan haknya. Lemahnya kewirausahaan. Masih percaya mitos. Moral hazard." Pertanyaan kita, kemana aje selama ini?

Bahkan, sejak Menteri Pertanian Soleh Solahuddin hingga Suswono, saya selalu dengar soal dampak revolusi hijau. Di mana dikatakan kondisi lahan pertanian kita sudah tidak subur a.l. akibat pemakaian pupuk di atas ambang batas. Begitu juga soal alih fungsi lahan.

Namun, apa yang sudah dilakukan? Ada upaya untuk mencegah konversi lahan dan apa program pupuk organik. Namun semua itu menjadi sulit diterima akal sehat. Pasalnya, soal kesuburan lahan, pemerintah tetap saja memberikan subsidi pupuk kimia triliunan rupiah. Dan soal alih fungsi lahan, tetap saja tinggi.

3 Pelabuhan

Terkait dengan mengurangi impor, Siswono mengusulkan hanya mendirikan tiga pelabuhan impor di Indonesia yakni di Sumatra, Sulawesi, dan Jawa.

"Saya kagum dengan Amerika [AS], untuk impor pangan mereka hanya punya tiga pelabuhan, sedangkan China hanya dua. Namun, Indonesia malah punya 70 pelabuhan dengan peralatan yang tidak lengkap. Karena itu kami mengusulkan tiga saja yakni di Sumatra, Sulawesi dan Jawa," tambahnya.

Namun, bukan itu pokok persoalan pertanian Indonesia. Sebab, yang diharapkan bangsa ini terutama petani dari pemerintah adalah arah kebijakan pembangunan yang terukur dan pro petani, ketegasan yang wajib didukung oleh sektor lainnya. (martin.sihombing@bisnis.co.id)

Manajemen holding BUMN perkebunan bakal diciutkan

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Kementerian BUMN berencana merampingkan struktur manajemen BUMN perkebunan setelah induk usaha (holding) perseroan tersebut terbentuk.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan perampingan struktur tersebut dilakukan agar masing-masing pihak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan efisiensi strategis dapat tercipta.

"Kami akan merampingkan struktur manajemen. Sesudah holding terbentuk apalagi holding investment, yang manajemen besar akan menjadi manajemen sedang atau kecil. Dengan begitu efisiensi strategisnya tinggi sekali. Kemudian yang di bawahnya lebih fokus pada produksi saja," ujarnya, kemarin.

Dia mencontohkan untuk di induk usaha, hanya akan ada tiga direksi yakni direktur utama, direktur produksi, dan direktur distribusi. Ketiga direksi ini juga akan mengurus masalah investasi, pembiayaan, pemasaran, teknologi, serta riset dan pengembangan (R&D).

"Misalnya, kalau kemarin ada 6 direksi, nanti cukup 3 saja, direktur utama, direktur produksi, direktur distribusi. Sedangkan [masalah] investasi, pembiayaan, pemasaran, teknologi, R&D [research & development] ditarik ke tingkat holding," jelasnya.

Holding BUMN perkebunan ini akan terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-XIV serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Pembentukan induk usaha tersebut terdiri dari dua tahap, yakni penyatuan seluruh BUMN per-

bunan, kemudian pengelompokan berdasarkan komoditas, misalnya, PTPN gula, PTPN kelapa sawit, dan lainnya.

2 Tahun

Proses pengelompokan tersebut membutuhkan waktu minimal 2 tahun, sehingga diperkirakan proses pembentukan induk usaha BUMN perkebunan secara keseluruhan dapat selesai pada akhir 2012.

"Untuk BUMN perkebunan kami mulai tahap satu di pengujung 2010. Untuk merampingkan keseluruhan proses holding paling sedikit 2 tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Mahmuddin Yassin mengemukakan setelah terbentuk holding, ada dua opsi privatisasi terhadap perusahaan perkebunan itu, yakni melepas saham induk perusahaan perkebunan, atau melepas saham salah satu anak usahanya melalui IPO (initial public offering).

Saat ini, tuturnya, kajian terhadap rencana pembentukan merger dilakukan oleh Danareksa dan Bahana. Holding yang terbentuk akan bisa melakukan leverage (utang) hingga Rp25 triliun.

"Dalam waktu dekat ini akan diketahui hasil kajiannya. Selain itu, juga akan keluar rancangan peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pembentukan holding perkebunan ini." (Bisnis, 15 September)

Menurut Mahmuddin, keputusan mengenai pelepasan saham akan ditentukan oleh induk perusahaan. Target perolehan dana disesuaikan dengan kebutuhan. (05/BAMBANG P. JATMIKO)

Info Penerbangan

| BATAVIA AIR Trust Us To Fly | |
|---|-------------------------------------|
| 6. SURABAYA 06.00, 07.15, 09.10, 14.30 16.25, 17.20, 19.20, 21.00 | 1. PALEMBANG 13.15 |
| 1. MALANG 10.20 | 3. PEKANBARU 09.15, 10.40, 16.30 |
| 2. SEMARANG 07.00, 16.30 | 2. PANGKAL PINANG 09.35, 14.20 |
| 1. SOLO 17.45 | 3. BATAM 07.10, 16.20, 11.40 |
| 2. JOGJAKARTA 14.30, 17.50 | 1. BERAU 08.40 |
| 1. BANDA ACEH 06.30 MES | 1. BENGKULU 13.40 |
| 4. MEDAN 07.00, 08.30, 13.10, 16.45 | 2. JAMBI 10.40, 15.00 |
| 3. PADANG 07.00, 10.50, 15.55 | 2. MANADO 09.05, 15.30 VIA BPN |

SALES & MARKETING : Tlp. (021) 386 4338,
Fax. : (021) 352 1738

| Rule & Jam Keberangkatan | |
|---|---|
| 6. UJUNG PANDANG 07.15, 16.25, 21.00 VIA SUB, 07.30 VIA BPN, 10.30, 22.45 | 1. PALANGKA RAYA 12.40 |
| 2. PALU 09.10 VIA SUB, 16.00 | 1. TANJUNG KARANG 08.00 |
| 1. LUWUK 07.15 VIA SUB, UPG (4 x Seminggu) | 2. DENPASAR 13.40, 19.25 |
| 2. KENDARI 10.30 VIA UPG, 08.15 | 1. AMPENAN 17.20 VIA SUB |
| 5. PONTIANAK 06.00, 09.40, 12.40, 14.05, 18.05 | 2. KUPANG 06.00, 14.30 VIA SUB |
| 2. BANJARMASIN 08.40 VIA BDU, 18.20 | 1. JAYAPURA 22.45 VIA UPG, MKV (4 x seminggu) |
| 3. BALIKPAPAN 07.30, 08.40 VIA BDU, 15.30 | 1. MANOKWARI 22.45 VIA UPG |
| 1. TARAKAN 08.15 | |

Informasi Reservasi Online :
Tlp. : (021) 386 4255

| Reservasi Jakarta (021) 38 999 888 | |
|--|--|
| 1. SORONG 22.45 VIA UPG (3 x seminggu) | 1. SINGAPORE 07.00 |
| 1. WAINGAPU 06.30 VIA DPS, KOE (3 x seminggu dari SUB) | KUCHING 09.40 VIA PNH (3 x seminggu) |
| 1. MAUMERE 08.30 VIA DPS, KOE (4 x seminggu dari SUB) | GUANGZHOU 08.10 (3 x seminggu) |
| 2. AMBON 01.05, 06.00 VIA SUB | JEDDAH 03.00 (5 x seminggu) |
| 2. TERNATE 01.25, 21.00 VIA SUB, UPG | RIYADH 03.00 (2 x seminggu) |
| 1. TANJUNG-PANDAN 10.30 | |
| 1. GORONTALO 07.15 VIA SUB, UPG (3 x seminggu) | |

Email : it-helpdesk@batavia-air.co.id
www.batavia-air.com

"Terbang Terus Dgn Batavia Air,
& Menangkan 360 Paket Umroh"

Efektif Mulai 5 September 2010

Jakarta - Medan (pp)
Jakarta - Banda Aceh (pp)

Melalui Terminal 1 C
Bandara Soekarno Hatta

KEBERANGKATAN DARI : Bandara Soekarno Hatta
DOMESTIK TERMINAL 1B ; INTERNATIONAL TERMINAL 2D